

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT

Lies Setyo Sri Rahayu, Shiddiq Nur Rahardjo<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the factors influencing the audit committee quality. The analysis used independent variable of independent commissioner, competency commissioner, commissioner activity, commissioner size, leverage, the existence of a Big Four auditor, managerial ownership, institutional ownership. And then, company size as control variable. The dependent variable is audit committee quality.*

*The statistic method to test the hypotheses is multiple linear regression. The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a company's annual report in 2012. Samples were taken at random from the 403 non-financial companies. Eighty non-financial companies designated as the calculation formula Babbie.*

*The results of this research indicate that independent commissioner, competency commissioner, commissioner activity, commissioner size, leverage, the existence of a Big Four auditor, institutional ownership is significantly positive influence the quality of the audit committee. Furthermore, managerial ownership is significantly negative influence the quality of the audit committee. While the leverage does not have a significant influence on the quality of the audit committee.*

*Keywords: audit committees, board of commissioner, leverage, the existence of a Big Four auditor*

### PENDAHULUAN

Keberadaan komite audit saat ini telah menjadi bagian dari *good corporate governance*. Dalam mewujudkan *good corporate governance*, komite audit telah diwajibkan secara legal untuk dimiliki oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. Kewajiban perusahaan untuk memiliki komite audit diterapkan sebagai tanggapan atas kasus perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat kurangnya efektivitas penerapan *good corporate governance*. Salah satu contohnya, kasus yang terjadi pada Enron yang memiliki *corporate governance* lemah hampir di semua hal sehingga menyebabkan terjadinya kesepakatan konflik kepentingan yang dilakukan direksi *non-excecitive*. Akibat atas hal tersebut, komite audit gagal menampilkan fungsinya pada pengendalian internal dan pemantauan fungsi audit eksternal (Solomon dan Solomon, 2008).

Sebagai tanggapan terhadap runtuhnya perusahaan, terdapat rekomendasi yang dibuat oleh banyak kelompok mengenai beberapa karakteristik komite audit. Rekomendasi tersebut disarankan sebagai indikator efektivitas komite untuk mencapai tujuan dan kualitas komite audit perusahaan secara keseluruhan. Regulasi perusahaan, profesi akuntansi, dan kelompok lainya membuat rekomendasi mengenai beberapa karakteristik seperti independensi, kompetensi, tingkat aktivitas dan ukuran komite audit (e.g. Cadbury Committee, 1992; Price Waterhouse, 1993; Blue Ribbon Committee, 1999; KPMG, 1999; ASX Corporate Governance Council, 2003, 2007 dalam Baxter 2010). Dengan membuat rekomendasi tersebut, kelompok ini secara implisit berpendapat bahwa karakteristik independensi, kompetensi, tingkat aktivitas dan ukuran komite audit merupakan indikator dari kualitas komite audit.

Menurut Baxter (2010), kualitas komite audit dapat diperkuat dengan meningkatkan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran mereka. Independensi komite audit mencerminkan anggota komite yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Menurut KNKG (2006) yang

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Kompetensi akuntansi atau keuangan berhubungan dengan keahlian akuntansi, keuangan, dan audit yang dimiliki oleh komite audit. Tingkat aktivitas komite audit dilihat melalui jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama periode satu tahun. Sedangkan ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kualitas komite audit.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

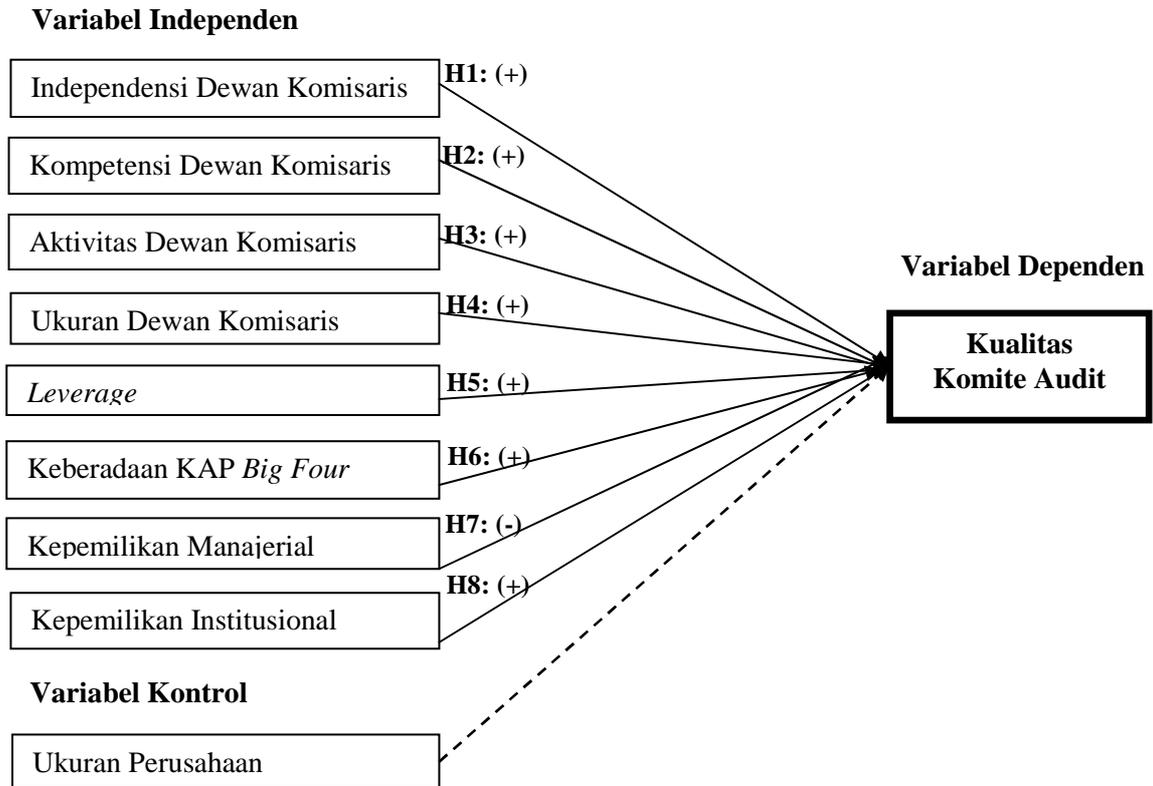
Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit adalah teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Pihak agen melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal sedangkan pihak prinsipal memberi imbalan pada pihak agen sesuai kontrak yang disepakati (Hendriksen, 2001). Di dalam perusahaan, pihak agen dianalogikan sebagai manajer perusahaan sedangkan pihak prinsipal adalah sebagai pemilik atau pemegang saham.

Dalam teori keagenan, prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham menyediakan fasilitas-fasilitas dan dana yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Sedangkan agen sebagai manajer merupakan pengelola perusahaan yang berkewajiban menjalankan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan menciptakan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan harapan pemilik. Manajer cenderung berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang ditanggung oleh pihak lain yaitu para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problem*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya informasi yang tidak lengkap atau biasanya dikenal sebagai asimetri informasi.

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme *monitoring* yang memainkan peranan penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Dengan demikian, komite audit berwenang dalam *monitoring* pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen sebagai pengguna internal tentunya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan perusahaan dibanding pemegang saham. Keadaan ini memicu terjadinya asimetri informasi, dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen dengan pemegang saham. Dengan adanya komite audit, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat sehingga diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan menguji dan menemukan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen serta penggunaan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas komite audit. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan tersebut, dibuat sebuah bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang diturunkan dari hipotesis. Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



**Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Dewan komisaris dipandang sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perusahaan, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugas dan fungsinya.

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa komite audit agar beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2002). Komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi oleh perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya akan fokus dan objektif pada pengawasan perusahaan. Dengan jumlah dewan komisaris independen dan ukuran dewan meningkat, maka dewan komisaris independen juga memiliki insentif dan kemampuan untuk memperkuat komite audit mereka dengan menambahkan *outside directors* untuk komite (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter, 2010). Argumen ini didukung oleh Klein (2002) yang menyatakan bahwa semakin besar kelompok *outside directors*, semakin mudah bagi dewan untuk memiliki komite audit independen. Tingkat kompetensi keuangan dan independensi dewan meningkat, ada insentif yang lebih besar dan kemampuan untuk meningkatkan kompetensi keuangan secara keseluruhan dari komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam baxter 2010). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>1</sub>: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.*

**Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Cadbury Report (1992) menyatakan bahwa kompetensi anggota dewan komisaris merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan dewan komisaris yang efektif. Kompetensi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan peran *monitoring*-nya adalah pengetahuan mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai proses

*corporate governance* (Wiwiek dkk., 2007). Dengan demikian, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis diprediksi akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perusahaan. Salah satunya, pengawasan dewan komisaris kepada komite audit terkait tugas komite audit dalam menelaah laporan keuangan. Oleh karena itu, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis diprediksi akan membentuk komite audit yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Beasley dan Salterio (2001) dalam Baxter (2010) bahwa tingkat kompetensi keuangan dan independensi dewan meningkat, ada insentif yang lebih besar dan kemampuan untuk meningkatkan kompetensi keuangan secara keseluruhan dari komite audit. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>2</sub>: Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit*

### **Pengaruh Aktifitas Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Menurut FCGI (2002) dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dalam rangka menjalankan tugas dalam mekanisme pengawasan, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan manajemen dan dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, frekuensi rapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan lebih intensif (Wahyuni, 2012). Cotter dkk. (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris, relevan, dan tepat waktu terutama tentang risiko serta kualitas pengendalian internal yang lebih baik. Selain itu, frekuensi pertemuan dewan menandakan aktivitasnya dan dapat menunjukkan ukuran efektivitas dan ketekunan (Adelopo, dkk., 2012). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif dalam pengawasan tata kelola perusahaan salah satunya pengawasan dalam kinerja komite audit. Semakin aktif dewan komisaris, maka semakin aktif pula komite audit sebagai subkomite dewan komisaris. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>3</sub>: Aktifitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit*

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Oleh karena itu komite audit adalah subkomite dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Dewan yang lebih besar seharusnya memperoleh manfaat lebih besar memantau efektifitas komite daripada dewan yang lebih kecil (Collier dan Gregory, 1999). Hal ini mencerminkan efisiensi operasional diperoleh dari pembagian tanggung jawab dewan tertentu kepada komite audit. Klein (2002) menyatakan bahwa independensi komite audit meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dewan dan independensi dewan. Oleh karena itu, komite audit yang dibentuk oleh dewan yang lebih besar seharusnya lebih aktif dan independen daripada yang dibentuk oleh dewan yang lebih kecil (Menon dan Williams, 1994). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>4</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.*

### **Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Komite Audit**

Ketika perusahaan melakukan *debt financing*, potensi konflik kepentingan muncul antara pemegang saham dan *debtholders* yang menimbulkan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh sebab itu, saat melakukan *debt financing*, perusahaan biasanya membuat suatu perjanjian atau kontrak utang. Kontrak utang tersebut berguna untuk mengurangi konflik antara *shareholders* dan *debtholders* serta memantau tindakan manajemen dalam perusahaan. Dalam kontrak utang, biasanya perusahaan diminta menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit (Smith and Warner, 1979). Namun, manajer perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk membuat pilihan kebijakan akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari biaya pelanggaran perjanjian utang. Dalam situasi seperti itu, maka dapat menurunkan kepercayaan pemegang saham dan

*debtholders*. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan pengawasan proses pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan *debtholders*. Saat *leverage* meningkat, dewan komisaris diperkirakan secara sukarela membentuk komite audit independen dengan kompetensi keuangan sebagai sarana meyakinkan *debtholders* bahwa komite audit secara efektif memantau proses pelaporan keuangan (Rainsbury, dkk., 2008). Dengan demikian, di saat perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dengan membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>5</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.*

### **Pengaruh Keberadaan KAP Big Four terhadap Kualitas Komite Audit**

KAP *Big Four* merupakan KAP yang sudah terkenal reputasi dan kualitas auditnya di Indonesia bahkan di mata Internasional. Ukuran KAP telah umum digunakan sebagai proxy untuk pemeriksaan kualitas audit. Kualitas auditor yang lebih tinggi ditentukan oleh ukuran mereka karena mereka memiliki basis klien yang lebih besar. Auditor yang lebih besar akan cenderung kehilangan klien mereka jika reputasi yang dimilikinya hilang (Becker dkk., 1998 dalam Baxter, 2010). Hilangnya reputasi dapat terjadi jika masyarakat mengenal auditor berhubungan dengan klien yang terlibat dalam manajemen laba yang mengurangi kualitas laporan keuangan mereka (Baxter, 2010). Potensi besar kerugian bagi auditor yang memiliki kualitas yang lebih tinggi menciptakan insentif yang relatif lebih besar untuk tetap independen dari klien mereka dibandingkan dengan auditor yang berkualitas lebih rendah yang memiliki banyak basis klien yang lebih kecil (Becker dkk., 1998 dalam Baxter, 2010). Auditor yang memiliki jumlah klien yang besar akan mengurangi insentif untuk bertindak curang guna mempertahankan salah satu klien (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* yang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi diharapkan memiliki insentif yang lebih besar untuk mendorong klien mereka untuk memperkuat kualitas komite audit guna mengawasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen perusahaan melalui peningkatan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran komite audit. Selain itu, menurut Sutaryo (2010), apabila perusahaan menggunakan jasa auditor dalam kelompok *Big Four* cenderung lebih banyak melakukan interaksi dan komunikasi dengan komite audit perusahaan dalam rapat komite audit, sehingga meningkatkan frekuensi rapat komite audit perusahaan. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>6</sub>: Keberadaan KAP Big Four berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.*

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit**

Dalam teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan manajemen. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik keagenan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer, maka manajer akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya dan akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa meningkatkan kepemilikan ekuitas oleh manajemen dapat mengurangi konflik keagenan tersebut, dengan demikian meningkatkan keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, teori keagenan memprediksi bahwa, karena tingkat kepemilikan manajerial meningkat, ada penurunan permintaan pengawasan oleh komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter 2010). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>7</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas komite audit.*

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Komite Audit**

Investor institusional merupakan salah satu kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat memonitor manajemen. Dalam hubungannya dengan fungsi *monitoring*, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Pemegang saham

institusional memiliki insentif untuk *monitoring* secara ketat terhadap manajemen dan menuntut mekanisme yang efektif dalam memastikan tata kelola perusahaan dilaksanakan (Shleifer dan Vishny, 1986; Smith, 1996). Shiller dan Pound (1989) dalam Fidyati (2004) menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan *monitoring* lebih efektif dan lebih menekankan pada laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan laba deviden yang mereka harapkan.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi dalam jumlah besar, maka semakin besar pula *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi. Adanya *monitoring* dari investor institusional akan mendorong dewan komisaris untuk meningkatkan pengawasan perusahaan secara optimal. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya kepemilikan institusional akan memotivasi dewan komisaris untuk membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

*H<sub>8</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.*

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite audit (AC\_QUAL) yang diprosikan dengan empat indikator yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, kompetensi akuntansi atau keuangan yang dimiliki anggota komite audit serta aktivitas komite audit. Untuk menyediakan pengukuran yang lebih komprehensif, maka indikator-indikator tersebut dijadikan satu menjadi variabel tunggal yaitu kualitas komite audit (AC\_QUAL). Pendekatan ini digunakan juga pada penelitian Baxter (2010) dan Paramitha (2013). Variabel kualitas komite audit (AC\_QUAL) diukur dengan memberikan skor *dummy* pada keempat indikator sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya skor *dummy* dijumlahkan sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4. Berikut kriteria pemberian skor *dummy*:

a. Independensi Komite Audit

Dalam penelitian ini independensi komite audit diketahui melalui persentase anggota komite audit yang independen terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota komite audit yang bersifat independen jumlahnya lima puluh persen atau kurang, dari keseluruhan anggota (Baxter, 2010).

b. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi akuntansi dan keuangan anggota komite audit ini diketahui melalui persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dari keseluruhan anggota komite audit. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit yang memiliki latar belakang sesuai kualifikasi di atas dan nilai 0 jika lima puluh persen atau kurang dari lima puluh persen (Baxter, 2010).

c. Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama periode satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 diberikan jika komite audit hanya menyelenggarakan rapat tiga kali atau kurang dari tiga kali dalam setahun (Baxter, 2010).

d. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit beranggotakan lebih dari tiga orang, nilai 0 jika jumlah anggota komite audit sebanyak tiga orang atau kurang (Baxter, 2010).

Sesuai dengan penelitian Baxter (2010), variabel dependen yang berupa kualitas komite audit (AC\_QUAL) dihitung dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator kualitas audit. Sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4.

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen (BCIND) diukur dengan presentase jumlah anggota komisaris yang diklasifikasikan sebagai independen (Baxter, 2010). Kompetensi Dewan Komisaris (BCEXP) diukur dengan presentase dewan komisaris yang memiliki kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis (Baxter, 2010). Aktivitas Dewan Komisaris (BCMEET) diukur dengan cara menjumlah frekuensi rapat yang dilaksanakan selama setahun (Baxter, 2010). Ukuran Dewan Komisaris (BCSIZE) diukur dengan cara menjumlah total anggota dari dewan komisaris (Baxter, 2010). *Leverage* (LEV) dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset (Baxter, 2010). Keberadaan KAP *Big Four* (KAP) Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *Big Four* diberi nilai 0 (Baxter, 2010). Kepemilikan Manajerial (MGOWN) diukur dengan cara menjumlahkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direktur dan komisaris non independen (Baxter, 2010). Kepemilikan Institusional (INSOWN) diperoleh dari presentase perbandingan lembar saham oleh pihak institusi dan total lembar saham beredar (Sutaryo, 2010).

### Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hingga akhir tahun 2012 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 478 perusahaan, yang terdiri dari 75 perusahaan keuangan dan 403 perusahaan non keuangan.

Sampel dalam penelitian ini adalah data perusahaan non keuangan yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*. Penentuan sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus formula Babbie (1983) dalam Rizal (2001):

$$n = \frac{N.pq}{(N-1)\frac{B^2}{4} + pq}$$

Dimana :

n= ukuran sampel yang diinginkan

N= ukuran populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

q = 1-p = 0,5

B = *Bound of error* atau kelonggaran kesalahan diperkirakan berinterval range tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{100,75}{(402)0.0025 + 0.25}$$

n = 80,28 = 80 perusahaan

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kualitas komite audit dengan variabel-variabel independennya. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$AC\_QUAL_{k,t} = \alpha_{0t} + b_{0t}BCIND + b_{1t}BCEXP + b_{2t}BCMEET + b_{3t}BCSIZE + b_{4t}LEV + b_{5t}KAP + b_{6t}MGOWN + b_{7t}INSOWN + b_{8t}LNSIZE + e_t$$

$\alpha_{0t}$  : konstanta

$AC\_QUAL_{k,t}$  : penjumlahan nilai variabel *dummy* dari keseluruhan indikator kualitas komite audit (independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran komite audit).

$b_{0t}BCIND$  : presentase jumlah anggota komisaris yang diklasifikasikan sebagai independen.

$b_{1t}BCEXP$  : presentase dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis.

$b_{2t}BCMEET$  : jumlah frekuensi rapat yang dilaksanakan selama setahun.

$b_{3t}BCSIZE$  : jumlah total anggota dari dewan komisaris.

$b_{4t}LEV$  : rasio utang terhadap total aset.

$b_{5t}KAP$  : keberadaan *Big Four* (variabel *dummy* : 1 untuk *Big Four* ; 0 untuk non *Big Four* ).

- $b_{6t}$ MGOWN : kepemilikan manajerial, diukur dari persentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer.  
 $b_{7t}$ INSOWN : persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.  
 $b_{8t}$ LNSIZE : diukur dari *Natural Log* total aset perusahaan.  
 $e_t$  : eror.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Pada penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2012 karena data tersebut merupakan data terbaru yang menggambarkan kondisi terkini perusahaan. Hingga akhir tahun 2012 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 478 perusahaan, yang terdiri dari 75 perusahaan keuangan dan 403 perusahaan non keuangan. Dari 403 perusahaan non keuangan terpilih 80 perusahaan sebagai sampel penelitian. Jumlah data tersebut didasarkan pada perhitungan formula Babie.

### Deskripsi Variabel

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Deskripsi Variabel**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AC_QUAL	80	1.00	4.00	2.7500	.53957
BCIND	80	.17	.80	.4083	.11124
BCEXP	80	.17	1.00	.4970	.21510
BCMEET	80	1.00	42.00	6.9500	7.30684
BCSIZE	80	2.00	12.00	5.0000	1.91596
LEV	80	.02	.93	.5119	.22033
KAP	80	.00	1.00	.5625	.49921
MGOWN	80	.00	.40	.0129	.05331
INSOWN	80	.10	.99	.7064	.20125
LNSIZE	80	23.55	39.74	28.9249	2.42596
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

**Tabel 2**  
**Deskripsi Variabel KAP**

Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
.00	35	43.8	43.8	43.8
1.00	45	56.3	56.3	100.0
Total	80	100.0	100.0	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kualitas komite audit adalah 2,75 yang berarti bahwa rata-rata komite audit pada perusahaan non keuangan memiliki kualitas yang baik.

Komite audit yg memiliki kualitas terendah memiliki nilai 1 sedangkan kualitas audit tertinggi memiliki nilai 4.

Independensi dewan komisaris menunjukkan besarnya rasio keberadaan komisaris independen dengan rata-rata sebesar 0,4083 yang berarti bahwa rata-rata keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sebesar 40,83% dari seluruh dewan komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Bapepam untuk jumlah komisaris independen yaitu sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Keberadaan komisaris independen paling rendah adalah 0,17 dan paling tinggi sebesar 0,8.

Kompetensi ekonomi dan bisnis dewan komisaris menunjukkan rata-rata sebesar 0,497 yang berarti bahwa rata-rata dewan komisaris yang memiliki kompetensi ekonomi dan bisnis dalam perusahaan sebesar 49,7% dari seluruh dewan komisaris. Dewan komisaris yang memiliki keahlian ekonomi dan bisnis dalam perusahaan paling rendah sebesar 0,17 dan paling tinggi sebesar 1.

Aktivitas dewan komisaris dilihat melalui jumlah pertemuan rapat yang dilakukan selama satu tahun menunjukkan rata-rata sebesar 6,95 yang berarti bahwa pertemuan rapat dewan komisaris selama satu tahun rata-rata melakukan rapat sebanyak 7 kali. Frekuensi rapat yang paling rendah sebanyak 1 kali dan yang paling tinggi sebanyak 42 kali.

Ukuran dewan komisaris diukur dari jumlah dewan komisaris dalam perusahaan yang menunjukkan rata-rata sebesar 5. Ukuran dewan komisaris paling rendah sebesar 2 dan paling tinggi sebesar 12.

*Leverage* perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 0,5119 berarti bahwa rata-rata perusahaan melakukan pembiayaan menggunakan hutang sebesar 51,19%. *Leverage* terendah sebesar 0,02 dan tertinggi 0,93.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* sebanyak 45 perusahaan dengan presentase 56,3%. Sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four* sebanyak 35 perusahaan dengan presentase 43,8%.

Kepemilikan saham manajerial menunjukkan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh para manajer dengan rata-rata sebesar 0,0129. Hal ini berarti bahwa rata-rata porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dalam perusahaan adalah sebesar 1,29% dari seluruh saham yang beredar. Kepemilikan saham manajerial paling rendah adalah 0 sedangkan paling tinggi 0,4.

Kepemilikan saham institusional menunjukkan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi di luar perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 0,7063. Hal ini berarti bahwa rata-rata porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi adalah sebesar 70,63% dari seluruh saham yang beredar. Kepemilikan saham institusional paling rendah adalah 0,10 sedangkan yang paling tinggi mencapai 0,99.

Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total asset (dalam bentuk transformasi *ln natural*) dari seluruh sampel penelitian selama satu tahun menunjukkan rata-rata sebesar 28,9249. Penggunaan transformasi *ln natural* ini disebabkan karena data awal memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang besar. Nilai ukuran perusahaan terendah adalah senilai 23,55 dan perusahaan terbesar adalah senilai 39,75.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap asumsi klasik, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan secara parsial terhadap masing-masing variabel independen. Hasil pengujian model regresi secara parsial diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik t terhadap Kualitas Komite Audit (AC\_QUAL)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.744	.662		-2.633	.010
BCIND	.771	.357	.159	2.158	.034
BCEXP	.863	.309	.223	2.788	.007
BCMEET	.239	.054	.339	4.469	.000
BCSIZE	.338	.126	.236	2.683	.009
1 LEV	.457	.275	.128	1.660	.101
KAP	.184	.092	.170	2.001	.049
MGOWN	-2.074	.944	-.178	-2.198	.031
INSOWN	.824	.367	.191	2.244	.028
LNSIZE	.077	.021	.348	3.654	.000

a. Dependent Variable: AC\_QUAL

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,034 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independensi dewan komisaris terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa independensi dewan komisaris meningkat akan meningkatkan pula kualitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Baxter (2010) bahwa independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Selain itu, penelitian ini didukung pula oleh peneliti Adelopo, dkk. (2012) bahwa peningkatan jumlah direktur independen menyebabkan meningkatkan aktivitas komite audit yang mengindikasikan peningkatan aktivitas dalam hal fungsi *monitoring*. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka dewan komisaris akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas komite audit dengan dengan cara menambahkan komisaris independen sebagai anggota komite audit. Keberadaan komisaris independen di dalam komite audit akan memperkuat independensi komite audit sehingga dalam menjalankan tugasnya akan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari. Selain itu, komite audit akan fokus pada tanggung jawab utama untuk membantu tugas dewan komisaris dalam *monitoring* perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,007 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi dewan komisaris terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa proporsi dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis meningkat akan meningkatkan kualitas komite audit. Dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis lebih mengetahui dan paham terkait masalah yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, dan sistem pelaporan keuangan perusahaan yang merupakan bagian dari tugas komite audit. Dengan demikian, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis lebih efektif dalam mengawasi kinerja komite audit sehingga menciptakan komite audit yang berkualitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Baxter (2010) bahwa kompetensi dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,000 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel aktivitas dewan komisaris terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa aktivitas dewan komisaris yang dilihat dari frekuensi jumlah rapat yang lebih sering akan meningkatkan kualitas komite audit. Dalam rangka menjalankan tugas dalam mekanisme pengawasan, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan manajemen dan dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif dalam pengawasan tata kelola perusahaan salah satunya pengawasan dalam kinerja komite audit. Semakin aktif dewan komisaris, maka semakin aktif pula komite audit sebagai subkomite dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Hasil ini konsisten dengan peneliti Adelopo dkk. (2012) bahwa aktivitas dewan direksi berpengaruh positif terhadap aktivitas komite audit.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,009 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran dewan komisaris terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa ukuran dewan komisaris yang dilihat dari jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan meningkatkan kualitas komite audit. Dewan yang lebih besar seharusnya memperoleh manfaat lebih besar memantau efektifitas komite daripada dewan yang lebih kecil (Collier dan Gregory, 1999). Hal ini mencerminkan efisiensi operasional diperoleh dari pembagian tanggung jawab dewan tertentu kepada komite audit. Komite audit yang dibentuk oleh dewan yang lebih besar seharusnya lebih aktif dan independen daripada yang dibentuk oleh dewan yang lebih kecil (Menon dan Williams, 1994). Oleh karena itu, semakin besar ukuran dewan komisaris akan membentuk komite audit yang berkualitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Baxter (2010) bahwa kompetensi dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,101 berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel *leverage* terhadap kualitas komite audit. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki banyak utang akan menurunkan kualitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Baxter (2010) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Dalam hasil penelitian tersebut terbukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas komite audit. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Paramitha (2013) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hasil ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan bahwa penyedia utang terus memantau perusahaan untuk memastikan persyaratan utang tidak dilanggar oleh perusahaan dengan membatasi *leverage* perusahaan sehingga membatasi manajemen perusahaan untuk melakukan penyalahgunaan aliran kas bebas dan dapat mengurangi masalah keagenan (Shleifer dan Vishny 1997). Pengawasan dari penyedia utang cenderung besar, maka perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi cenderung membutuhkan pengawasan dari komite audit yang lebih sedikit (Sharma dkk., 2009). Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami *leverage* yang tinggi akan cenderung menurunkan kualitas komite audit di dalam perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa keberadaan KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,049 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel keberadaan KAP *Big Four* terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan terdorong untuk meningkatkan kualitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutaryo, dkk (2010) bahwa kualitas auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi rapat

komite audit. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Baxter (2010) yang menunjukkan bahwa keberadaan KAP *Big Four* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas komite audit. KAP *Big Four* merupakan KAP yang telah terkenal reputasi dan kualitas auditnya. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Auditor yang memiliki jumlah klien yang besar akan mengurangi insentif untuk bertindak curang guna mempertahankan klien (DeAngelo, 1981). Oleh karena itu, KAP *Big Four* dipercaya memiliki kualitas audit yang lebih baik dibanding KAP *non Big Four* sehingga memiliki insentif yang lebih besar untuk mendorong dewan komisaris sebagai klien mereka untuk tidak bertindak curang. Dengan demikian, dewan komisaris akan meningkatkan kualitas komite audit untuk mengawasi dan menelaah laporan keuangan perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,031 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien negatif berarti bahwa perusahaan memiliki kepemilikan manajerial dalam jumlah besar akan cenderung menurunkan kualitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutaryo dkk. (2010) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Baxter (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas komite audit. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer, maka manajer akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya dan akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja manajemen. Dengan demikian, kepemilikan oleh manajemen dapat menggantikan sebagian mekanisme *monitoring* (Fama dan French, 2001). Tingkat kepemilikan manajerial ekuitas meningkat, ada sedikit permintaan untuk pengawasan oleh komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter 2010). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dalam jumlah yang besar akan cenderung menurunkan kualitas komite audit.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana signifikansi sebesar 0,028 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan institusional terhadap kualitas komite audit. Arah koefisien positif berarti bahwa perusahaan memiliki kepemilikan institusional dalam jumlah besar akan meningkatkan kualitas komite audit. Investor institusional akan melakukan *monitoring* lebih efektif pada perusahaan terutama pada laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan laba deviden yang mereka harapkan. Adanya *monitoring* yang lebih efektif dari investor institusional, maka perusahaan akan meningkatkan pengawasan secara optimal. Oleh karena itu perusahaan akan membentuk komite audit yang berkualitas untuk meningkatkan pengawasan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para investor bahwa komite audit secara efektif memantau proses pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutaryo, dkk (2010) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi rapat komite audit.

Hasil pengujian terhadap variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap kualitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Baxter (2010) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas komite audit. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dan semakin besar pula resiko kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki komite audit yang berkualitas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan internal perusahaan (Paramitha, 2013).

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kualitas komite audit. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan pengujian regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, dan kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Selain itu, kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, Nilai *adjusted R-Square* sebesar 58,8% cukup tinggi, namun masih ada sisa sebesar 41,2% peluang dipengaruhi oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas komite audit. *Kedua*, Periode penelitian yang dilakukan hanya satu periode yaitu tahun 2012 sehingga data yang diperoleh relatif sedikit.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel penelitian lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kualitas komite audit seperti rugi perusahaan. Selain itu, memperpanjang periode penelitian dan menambahkan sampel penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif.

## REFERENSI

- A., Nuraini dan Sumarno Zain. 2007. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba". *Jurnal MAKSI (Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol. 7 No. 1, pp. 19-32.
- Adelopo, Ismail; Kumba Jallow dan Peter Scott. 2012. Determinants Of Audit Committees' Activity: Evidence From The UK. *Social Responsibility Journal*, Vol. 8 No. 4, pp. 471-483.
- Bestivano, Wildham. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan di BEI)". *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Baxter, Peter. 2010. "Factors associated with the quality of audit committees". *Pacific Accounting Review*, Vol. 22 No. 1, pp. 57-74.
- Cadbury Committee. 1992. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. *ISBN*.
- Collier, P. dan Gregory, A. 1999. "Audit committee activity and agency costs". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 18 No. 1, pp. 311-32.
- Cotter, J. dan Silvester, M. 2003. "Board and monitoring committee independence". *ABACUS*, Vol. 39 No. 2, pp. 211-32.
- DeAngelo, L. 1981. "Auditor Size dan Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 3, December, pp. 183-99.
- Fama, E., F., dan K., Frech. 2001. Disappearing dividends changing firm characteristics or lower propensity to pay. *Journal of Finance Economics* 60 (13): 3-43.
- Fama, E. dan Jensen, M. 1983. "Separation of ownership and control", *Journal of Law dan Economics*, Vol. 26, pp. 301-25.

- Fidyati, Nisa. 2004. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Seasoned Equity Offering (SEO)". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2 (1), pp. 1-23.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. "*Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance)*". Jakarta: KNKG.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarsih, dan Bambang. 2008. "Struktur Corporate Governance dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Studi Pada Perusahaan Jasa di BEI". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 204-216 Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka, Malang.
- Hendriksen, E. S., dan Breda, M. F. 2001. *Teori Akuntansi*. 6 ed. Batam: Interaksara.
- Indrayati, Martha Rizki. 2010. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Juwitasari, Ratih. 2008. "Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, Dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007". *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. "Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs dan ownership structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305-60.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Klein, A. 2002. "Economic determinants of audit committee independence". *The Accounting Review*, Vol. 77 No. 2, pp. 435-52.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Paramitha, Riyantini Amalia. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Peraturan BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
- Rachmawati, Danri dan Hanung Triatmoko. 2007. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*, Makasar.
- Rainsbury, E., Bradbury, M. dan Cahan, S. 2008. "Firm characteristics and audit committees complying with 'best practice' membership guidelines", *Accounting and Business Research*, Vol. 38 No. 5, pp. 393-408.

- Rizal, Muhammad. 2001. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan di BEJ dan BES". *Tesis tidak dipublikasikan*, Universitas Diponegoro.
- Sharma, V. V., Naiker., dan B., Lee. 2009. Determinants of audit committee meeting frequency: evidence from a voluntary governance system. *Accounting Horizons*, Vol. 23, No. 3, pp. 245-263.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *The Journal of Political Economy*, Vol. 94, No. 3, Part 1. pp. 461-488.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. A survey of corporate governance. *Journal of Finance* 52. Vol. LII, No 2.
- Smith, C. and Warner, J. 1979. "On financial contracting: an analysis of bond covenants". *Journal of Financial Economics*, Vol. 7, pp. 117-61.
- Solomon, J. and Solomon. A. 2008. *Corporate governance and accountability*. 2 ed. England Chichester: John Wiley & Sons.
- Sutaryo, Payamta, dan Bandi. 2010. Penentu Frekuensi Rapat Komite Audit: Bukti Pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia. *Bidang Kajian: Good Corporate Governance*.
- Tarjo. 2002. "Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Publik Indonesia. *Tesis*, Universitas Gajah Mada.
- Tarjo. 2008. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital". *Symposium Nasional Akuntansi 11*, Makasar.
- Ujiyantho, Arief, dan Bambang Pramukan. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur)". *Symposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahyuni, Tri. 2012. "Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Bei Periode 2008-2010)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Arie Dan Hilda Rossieta. 2008. "Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit– Suatu Studi Dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark". *Jurnal Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Wiwiek, andriani; Sukartini, dan Reno Fithri Meuthia. 2007. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance". *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 2 No.2.